

BAB I

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah satuan kerja perangkat daerah, dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut pada pasal 2 menjelaskan bahwa Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A.

A. Capaian Pelaksanaan Program

Pelaksanaan Program Kerja Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 didukung oleh Dana APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar **Rp.20.084.267.691,-** yang terdiri dari :

SUMBER DANA	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA	%
o BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.510.409.114	9.426.390.635	99.12	84.018.479	0.88
o BELANJA LANGSUNG	10.573.858.577	10.223.165.102	96.68	350.693.475	3.32
Jumlah	20.084.267.691	19.649.555.737	97.84	434.711.954	2.16

Untuk mendukung urusan wajib Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dialokasikan anggaran APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.10.573.858.577,- dan realisasi sebesar Rp.10.223.165.102,- (96,68%), Urusan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun anggaran 2019 yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) Program, yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 1.911.221.804,- dan realisasi sebesar Rp.1.851.090.662 (96,85%).
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp.373.956.488,- dan realisasi sebesar Rp. 355.928.310 (97,00%).

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar Rp.66.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 65.780.700 (99,67%).
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar Rp.510.860.900,- dan realisasi sebesar Rp. 477.104.349,- (93,39%).
5. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp.416.659.000,- dan realisasi sebesar Rp. 406.900.443,- (95,91%)
6. Program Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat sebesar Rp.140.994.400,- dan realisasi sebesar Rp. 120.790.301,- (85,67%), dengan capaian program : Pengaduan masyarakat yang dapat ditangani, dengan indikator kinerja persentase kasus yang ditangani/diselesaikan 100%, adapun jenis pengaduan masyarakat yang ditangani/diselesaikan oleh Inspektorat Daerah Provinsi adalah sebagai berikut :

a. Kasus izin perkawinan/perceraian PNS (PP No.10/1983 jo PP No. 45/1990)
b. Kasus pelanggaran disiplin PNS (PP No.30/1980 / PP 53 tahun 2010 / PP No. 32 tahun 1979 / Pergub No. 30 Tahun 2006)
c. Pemeriksaan kasus atas pengaduan masyarakat
d. Pemeriksaan khusus atas Instruksi/Permintaan Pejabat Berwenang
e. Pemeriksaan khusus lanjutan dari Pemeriksaan Reguler

7. Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum sebesar Rp. 7.154.165.985,- dan realisasi sebesar Rp. 6.945.570.337,- (97.08%), capaian program sebagai berikut:
 - a. Penurunan nilai kerugian daerah dengan target kinerja 7,8%
 - b. Rekomendasi atas LHP yang ditindaklanjuti dengan target kinerja 75%
 - c. Tingkat Kematangan Implementasi SPIP (Sistem Pengawasan Intern Pemerintah) dengan target kinerja Level 3
 - d. Perangkat Daerah Provinsi Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Bersih dan Melayani (WBBM) dengan target kinerja 6 Perangkat Daerah

Dari tujuh program yang telah ditetapkan sebagai program/kegiatan pada tahun 2019 melalui APBD telah dialokasikan anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) setelah Anggaran Perubahan sebesar **Rp.20.084.267.691,-** Realisasi Keuangan termasuk Anggaran Perubahan sebesar **Rp.19.649.555.737,-** rincian sebagai berikut:

SUMBER DANA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	%
1	2	3	4	5
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.510.409.114	9.426.390.635	84.018.479	0.88
- Gaji dan Tunjangan Pegawai	5.897.178.031	5.868.698.385	28.479.646	0.48
- Tambahan Penghasilan PNS	3.613.231.083	3.557.692.250	55.538.833	1.54
B. BELANJA LANGSUNG	10.573.858.577	10.223.165.102	350.693.475	3.32
1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran	1.911.221.804	1.851.090.662	60.131.142	3.15
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.152.000	23.075.250	76.750	0.33
b. Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	338.969.700	316.776.385	22.193.315	6.55
c. Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	487.093.964	486.377.604	716.360	0.15
d. Penyediaan Alat Tulis Kantor	69.358.600	69.355.800	2.800	0,99
e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	64.383.000	64.212.492	170.508	0.26
f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.650.000	5.591.300	58.700	1.04
g. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.500.000	14.815.000	4.685.000	24.03
h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	31.920.000	31.578.000	342.000	1.07
i. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	796.234.540	770.042.331	26.192.209	3.29
j. Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	18.800.000	13.506.000	5.294.000	28.16
k. Penyediaan Makanan dan Minuman	56.160.000	55.760.500	399.500	0.71
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	373.956.488	355.928.310	18.028.178	4.82
a. Pengadaan Mobiller	14.400.000	14.256.000	144.000	1.00
b. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputer	15.000.000	13.585.000	1.415.000	9.43
a. Pengadaan Peralatan Studio Komunikasi dan Informasi	25.615.000	25.447.000	168.000	0.66
b. Pemeliharaan rutin /berkala alat studio, alat komunikasi dan alat informasi	3.500.000	3.440.000	60.000	1.71
e. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	27.250.000	27.091.400	158.600	0.58
f. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas	121.091.488	107.480.660	13.610.828	11.24

1	2	3	4	5
g. Pemeliharaan rutin /berkala Peralatan dan Perlengkapan kantor	21.250.000	21.214.250	35.750	0.17
h. Pemeliharaan rutin /berkala Komputer dan jaringan Komputerisasi	27.700.000	26.814.000	886.000	3.20
k. Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Gedung kantor	18.150.000	18.150.000	0	0
l. Pengadaan Sistem Informasi hasil Pengawasan	100.000.000	98.450.000	1.550.000	1.55
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	66.000.000	65.780.700	219.300	0.33
a. Pengadaan Pakaian dinas beserta Perlengkapannya	66.000.000	65.780.700	219.300	0.33
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	510.860.900	477.104.349	33.756.551	6.61
a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	510.860.900	477.104.349	33.756.551	6.61
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	416.659.000	406.900.443	9.758.557	2.34
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	259.087.000	252.707.400	6.379.600	2.46
b. Penatausahaan Keuangan SKPD	126.018.000	125.643.555	374.445	0.30
c. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	31.554.000	28.549.488	3.004.512	9.52
6. Program Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	140.994.400	120.790.301	20.204.099	14.33
a. Peningkatan Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat	140.994.400	120.790.301	20.204.099	14.33
7. Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum	7.154.165.985	6.945.570.337	208.595.648	2.92
a. Peningkatan Pemeriksaan, Reviu dan Evaluasi	4.164.069.818	4.127.706.138	36.363.680	0.87
b. Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan	881.200.400	858.020.126	23.180.274	2.63
c. Pengembangan dan peningkatan wawasan aparatur pengawasan	155.640.600	102.900.100	52.740.500	33.89
d. Pemantapan perencanaan, koordinasi dan administrasi pengawasan	729.563.700	717.176.215	12.387.485	1.70
e. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	104.390.400	92.977.023	11.413.377	10.93
f. Evaluasi SPIP dan Pencegahan Korupsi	359.847.067	333.090.259	26.756.808	7.44
g. Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	100.590.400	94.957.850	5.632.550	5.60

1	2	3	4	5
h. Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK/WBBM)	115.400.000	106.415.051	8.984.949	7.79
i. Pengendalian Gratifikasi	60.590.400	50.924.650	9.665.750	15.95
j. Pengelolaan LHKPN dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	106.190.400	103.054.365	3.136.035	2.95
k. Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar	376.682.800	358.348.560	18.334.240	4.87
Total	20.084.267.691	19.649.555.737	434.711.954	97.84

B. Outcome Program

Untuk tahun 2019, terdapat 2 (dua) program yang mendukung urusan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

1. Program Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pada program Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat ini, terdapat 30 (tiga puluh) kasus yang diterima dan dapat ditangani seluruhnya 100% dengan rincian sebagai berikut :

a. Pemeriksaan kasus izin perkawinan/perceraian PNS (PP Nomor 10/1983 jo PP Nomor 45/1990)	2 kasus
b. Pemeriksaan kasus pelanggaran disiplin PNS (PP Nomor 30/1980 / PP Nomor 53 tahun 2010 / PP Nomor 32 tahun 1979 / Pergub Nomor 30 Tahun 2006)	7 kasus
c. Pemeriksaan kasus atas pengaduan masyarakat	8 kasus
d. Pemeriksaan khusus atas Instruksi/Permintaan Pejabat Berwenang	11 kasus
e. Pemeriksaan khusus lanjutan dari Pemeriksaan Reguler	1 kasus
f. Pemeriksaan khusus Whistle Blowing System	1 kasus
Jumlah	30 kasus
Dari pemeriksaan kasus yang ditangani tersebut, dapat diberikan rekomendasi sebagai berikut :	
a. Kasus izin perkawinan/perceraian PNS (PP Nomor 10/1983 jo PP Nomor 45/1990)	2 kasus
b. Pemeriksaan pelanggaran disiplin sesuai PP 53/2010, PP 32/1979, PP 10/1983 jo PP 45/1990, dengan rekomendasi:	7 kasus
• Kategori Hukuman Disiplin Berat	9 orang
• Kategori Hukuman Disiplin Sedang	14 orang
• Kategori Hukuman Disiplin Ringan	23 orang

2. Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum

Realisasi dari capaian program peningkatan fungsi pengawasan dan penegakan hukum yaitu:

- a) Penurunan nilai kerugian daerah dengan target kinerja 7,8% dan realisasi sebesar 3,22% dengan capaian 41,29%, temuan berupa kerugian Negara/Daerah dan Kewajiban Setoran ke Kas Negara/Daerah sebesar Rp.685.682.958,-.
- b) Rekomendasi atas LHP yang ditindaklanjuti dengan target kinerja 75% dan realisasi 80,08% dengan capaian 106,7%.
- c) Tingkat Kematangan Implementasi SPIP (Sistem Pengawasan Intern Pemerintah) dengan target kinerja Level 3 dan realisasi Level 3 dengan capaian 100%.
- d) Perangkat Daerah Provinsi Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Bersih dan Melayani (WBBM) dengan target kinerja 6 Perangkat Daerah dan realisasi 6 Perangkat Daerah dengan capaian 100%.

Pada program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum ini, terdapat 11 (sebelas) kegiatan untuk melaksanakan program tersebut, yaitu :

a. Kegiatan Peningkatan Pemeriksaan, Reviu dan Evaluasi

Indikator Kinerja Output yaitu laporan hasil pemeriksaan pemeriksaan yang diterbitkan dan jumlah obrik yang diperiksa dengan target 105 obrik/LHP, 21 Reviu/Evaluasi, realisasi 93 (Sembilan puluh tiga) objek pemeriksaan (OP) , 24 reivu dan evaluasi dengan capaian 88,57% dengan jumlah temuan 844 dan 1.807 saran, yang terdiri dari :

1) Audit ketaatan

- OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 27 OPD
- SMA/SMK di Kab/Kota 24 SMA/SMK (8 Kab/Kota)

2) Audit Kinerja 6 OPD

3) Reviu, monitoring dan evaluasi 24 kali

4) Pengawasan Umum Kabupaten/Kota 12 OPD

b) Kegiatan Peningkatan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan penjelasan sebagai berikut :

1) Terlaksananya Evaluasi Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan :

No	Uraian	Saran	Realisasi	TL
1	Inspektorat Daerah Provinsi	1.807	1.134	(62,75)
2	BPK	40	31	(77,50)
3	Itjen Kementerian Dalam Negeri	23	23	(100)
	Jumlah	1.870	1.188	80,08

Pada peningkatan evaluasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan target 75% dengan realisasi 80,08% diperoleh capaian 106,7%.

2) Monitoring/ pemantauan TLHP hasil pemeriksaan

Inspektorat Daerah Provinsi, BPK, Itjen Kepmendagri, dan Itjen
Kementerian Teknis lainnya 22 Kali

3) Rapat Koordinasi Pengawasan Pembahasan Tindak Lanjut

Itjen Kemendagri 2 Kali

4) Rapat Pemutakhiran Data

Itjen Kemendagri 2 Kali

5) Rapat Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

BPK 6 Kali

6) Tersedianya data hasil pengawasan dan terselesaikannya tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi & APF lainnya serta lancarnya pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

c) Kegiatan Pengembangan dan peningkatan wawasan aparatur pengawasan dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Output yaitu Terkirimnya peserta untuk mengikuti Bimtek, sosialisasi dan diklat teknis dengan target 160 orang sosialisasi, 40 orang diklat teknis, realisasi 41 orang diklat teknis dan 190 orang diklat/penataran lainnya, dengan capaian 110%.

1) Terkirimnya peserta untuk mengikuti Bimtek, Sosialisasi dan diklat teknis:

- Diklat Teknis	31 Org
- Diklat/Penataran Lainnya	<u>190 Org</u>
	221 Org

2) Meningkatnya pengetahuan dan wawasan auditor dan Meningkatnya kualitas sumber

daya aparatur Inspektorat Daerah Provinsi Sumbar.

- d) Kegiatan Pemantapan perencanaan, koordinasi dan administrasi pengawasan
Indikator kinerja output yaitu tersusunnya program kerja pengawasan tahunan (PKPT) tahun 2019 dengan target 1 PKPT dan realisasi 1 PKPT, capaian 100% .
- e) Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)
Indikator kinerja output yaitu terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah daerah dengan target 19 kab/kota dan realisasi 19 kab/kota, dengan capaian 100%.
- f) Kegiatan Evaluasi SPIP dan Pencegahan Korupsi
Indikator kinerja output yaitu terselenggaranya workshop, evaluasi SPIP dan Pencegahan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan target 50 SKPD dan 2 laporan, realisasi 50 SKPD dan 2 laporan dengan capaian 100%.
- g) Kegiatan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
Indikator kinerja output yaitu nilai evaluasi reformasi birokrasi dengan target 62 dan realisasi 69,63 dengan capaian 112%.
- h) Kegiatan Pengendalian Gratifikasi dengan penjelasan sebagai berikut :
- 1) Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi pada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
 - 2) Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan SKPD tentang Gratifikasi Pemerintah Daerah 100%.
- i) Kegiatan Pengelolaan LHKPN dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
Indikator kinerja output yaitu terselenggaranya pengelolaan harta kekayaan, target 100 wajib lapor LHKPN dan LHKASN, realisasi 1000 wajib lapor LHKPN/LHKASN dengan capaian 100% dengan penjelasan sebagai berikut :
- 1) Terselenggaranya Penyusunan Laporan Harta Kekayaan bagi Wajib Lapor LHKPN dan LHKASN
 - 2) Terwujudnya Penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN dan perbuatan tercela lainnya di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 100%
 - 3) Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang mentaati azas umum penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN dan perbuatan tercela lainnya di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

j) Kegiatan Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK/WBBM)

Indikator kinerja output yaitu terselenggaranya pembinaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dengan target 6 OPD realisasi 6 OPD dan capaian 100% dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Terselenggaranya Pembinaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi terhadap 6 SKPD
- 2) Tersedianya Laporan Pembinaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi 100 %

k) Kegiatan Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar diperoleh hasil :

Indikator kinerja output yaitu terlaksananya pengawasan terhadap pungutan liar dengan target kinerja 1 laporan realisasi 1 laporan dan capaian 100%

Terlaksananya pengawasan terhadap pungutan liar dan terlaksananya pelayanan publik yang bebas dari pungutan liar 100%

C. Capaian Indikator Kinerja Daerah

Sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan urusan penunjang pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, selain mengacu pada realisasi pelaksanaan program dan kegiatan juga dapat dilihat dari realisasi pelaksanaan indikator kinerja daerah. dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 Inspektorat berada pada Misi 2 yaitu : Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional, terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu :

1. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan
2. Nilai Evaluasi SAKIP

Inspektorat Daerah tidak memiliki IKU dalam RPJMD, namun mendukung terhadap pencapaian kedua IKU tersebut. Adapun realisasi capaian pelaksanaan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah untuk Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel Realisasi Capaian IKU Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019**

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2019		CAPAIAN
		TARGET	REALISASI	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Pemerintah Daerah	7,75	7,66	98,83
2.	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Level 3	Level 3	100%

Berdasarkan data tabel capaian IKU Inspektorat diatas, diketahui bahwa program/kegiatan yang telah ada dapat mendukung pencapaian yang ditetapkan dengan capaian 98,83% dan 100%.

Pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 terdapat indikator kinerja Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 untuk Inspektorat Daerah yaitu :

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
		2019	2019	
A I 1	Aspek Pelayanan Umum Fungsi Penunjang Fungsi Lainnya a. Tingkat Kematangan Implementasi SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Level (1-5)	3	3	100%

D. Permasalahan dan Solusi

Dengan telah dilaksanakannya 7 (tujuh) Program dengan 38 (tiga puluh delapan) kegiatan pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 dengan dukungan dana/anggaran belanja langsung wajib tersebut sebesar **Rp. 10.573.858.577,-** dimana realisasi fisik (100 %) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.223.165.102,- (96,68 %), tidak ditemukan permasalahan yang cukup signifikan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2019 adalah masih kurangnya ketersediaan jumlah Sumber Daya Manusia untuk jabatan fungsional auditor/P2UPD/auditor kepegawaian. Sehingga Program Kerja Pengawasan Tahunan tidak dapat di realisasikan 100%, sehingga ada obrik yang batal diperiksa karena tidak cukupnya Sumber daya manusia atau APIP yang akan ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan. Untuk itu, perlu kiranya dilakukan penambahan Sumber Daya Manusia untuk jabatan fungsional tersebut melalui mutasi pindah/impassing maupun pembentukan baru agar program dan kegiatan yang telah di tetapkan dapat di jalankan dan direalisasikan.

E. Penghargaan Nasional Yang Diterima

- 1) Piagam Penghargaan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai “Instansi dengan Pengelolaan LHKPN terbaik tahun 2019” dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta 09 Desember 2019



- 2) Piagam Penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai “Provinsi yang telah “Menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Penyelenggaraan Pemerintah Daerah” oleh Inspektorat Kementerian Jenderal Dalam Negeri tahun 2018 dan tahun sebelumnya, di Jakarta 25 September 2019.



F. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2019

Terkait dengan Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap LKPJ akhir tahun anggaran 2019, terdapat beberapa rekomendasi terkait dengan penyelenggaraan urusan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Adapun tanggapan terhadap rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) *Rekomendasi* : Penambahan jumlah pegawai melalui perekrutan CPNS dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui kegiatan Bimtek, Diklat, Workshop dan pelatihan-pelatihan.
- 2) *Tanggapan* : Penambahan jumlah pegawai sudah diusulkan ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat sedang menunggu proses perekrutan CPNS tahun 2019 - 2020, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat juga telah menerima pegawai mutasi/pindah dari OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk peningkatan kompetensi aparatur sipil negara, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah mengajukan usulan Rencana Diklat tahun 2019 sesuai dengan anggaran dan telah di realisasikan dengan mengikuti diklat, bimtek, workshop dan pelatihan baik di daerah maupun tingkat pusat.

Padang, Januari 2020

INSPEKTUR,



Drs. MARDI, MM

Pembina Utama Madya

NIP 19601211 198203 1 007